

# STRATEGI DISINTEGRASI AKTOR NON-NEGARA DALAM PENDEKATAN REBEL DIPLOMACY: UPAYA OPM MEMISAHKAN PAPUA DARI NKRI

**ESI ESTIANI**

Universitas Abdurrah  
Esiestiani16@student.univrab.ac.id

## ***Abstrak***

Papua merupakan bagian dari NKRI, namun upaya dari gerakan separatisme untuk memisahkan Papua dari NKRI masih terjadi sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan menggambarkan strategi OPM dalam upaya disintegrasi Papua dari NKRI. Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep *rebel diplomacy* dimana kelompok pemberontak terlibat dalam diplomasi untuk menggupayakan kemerdekaan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif jenis penelitian deskriptif dan pengumpulan data berbentuk sekunder dari berbagai sumber website ataupun berita yang telah dipublikasikan. Hasil dari penelitian ilmiah ini didapatkan jawaban bahwa strategi yang dilakukan OPM adalah internasionalisasi Papua dengan dipengaruhi oleh penyebaran alat teknologi komunikasi secara meluas dan telah diberdayakan oleh kelompok pemberontak domestik dan internasional oleh aktor Non-negara lainnya untuk memperkuat suara mereka secara internasional.

**Kata kunci:** Papua, Aktor Non-negara, OPM, *Rebel diplomacy*.

## **PENDAHULUAN**

Dinamika sosial politik dan keamanan di Indonesia ternyata tidak dapat dilepaskan dari konflik. Konflik ini terjadi akibat kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga melahirkan rasa ketidakadilan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sejak awal kemerdekaan, organisasi-organisasi yang mengganggu stabilitas Indonesia sebagai negara berdaulat banyak bermunculan, seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh, TII di Makassar, Fretilin di Timor Timur, dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua. Pergolakan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

saja, mengingat pembentukan NKRI juga didasari dengan upaya perlawanan dari berbagai daerah dan suku bangsa terhadap Belanda.( Yuling Malo, 2017:1)

OPM didirikan oleh Jacob Hendrik Prai pada tahun 1965. Di tahun yang sama pada tanggal 26 Juli dibawah pimpinan Permenas Ferry Awom, mantan anggota Batalyon Sukarelawan Papua, organisasi ini melakukan pemberontakan pertama kalinya di Manokwari. Namun ada tokoh seseorang yang menjadi dalang dalam kerusuhan Papua dan Papua Barat tokoh tersebut adalah Benny Wenda. Pria kelahiran Papua pada 17 Agustus 1974 merupakan salah satu tokoh pembebasan Papua Barat yang saat ini berada di Oxford, Inggris. Benny Wenda mendapatkan suaka politik setelah melarikan diri dari Indonesia pada tahun 2002. Pemerintah Indonesia telah menuding Benny Wenda sebagai sosok di balik serangan terhadap pos-pos TNI/Polri pada 2002. Akan tetapi Benny Wenda mendapatkan penghargaan dari Dewan Kota Oxford karena dianggap sebagai tokoh perdamaian. Penghargaan tersebut tentu menjadi protes bagi pemerintah Indonesia sendiri. Kemudian benny wenda sendiri memiliki hubungan dekat dengan pimpinan OPM yaitu Matias Wenda yang merupakan saudara kandungnya.

Benny Wenda memiliki jaringan yang cukup luas di ranah internasional. Dan bahkan dia sendiri pernah bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Pemerintah Vanuatu menjadi pihak yang memfasilitasi tokoh pembebasan Papua Barat untuk bertemu komisi tinggi HAMPBB. Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke Kantor KTHAM pada 25 Januari 2019. Dengan melalui akun media sosialnya Benny Wenda mengklaim telah membentuk *United Liberation for West Papua* (ULMWP) atau serikat pembebasan Papua Barat. Dia menolak adanya label separatistis dan penjahat oleh pemerintah NKRI. Hal tersebut di respon oleh Kodam XVII/Cenderawasih yang menilai itu hanya bentuk propaganda Benny untuk mencari perhatian internasional. Terkait dengan kerusuhan yang terjadi di papua dan papua barat, Benny Wenda menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan tersebut dianggap sebagai spontanitas masyarakat disana. Namun, menurut pihak kepolisian ada pihak dari luar Indonesia yang memprovokasi sehingga keadaan di tanah Papua terkesan sangat mengkhawatirkan. Pihak luar tersebut diduga memprovokasi agar masalah papua dapat dibawa ke forum PBB.

OPM merupakan Organisasi yang terdiri dari tiga elemen, yaitu: pertama, kelompok bersenjata yang mengontrol wilayah-wilayah tertentu, kedua, kelompok yang melakukan demonstrasi, ketiga, kelompok kecil yang berada di luar negeri yang berfungsi meraih dukungan Internasional. (*Institute for Policy of Conflict*, 2015).

## STUDI LITERATUR

Kajian terdahulu merupakan uraian sistematis dari penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Kajian terdahulu berfungsi untuk memetakan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu sehingga terlihat keaslian dan keunikan dari penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan strategi-strategi OPM dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua.

**Pertama**, penelitian ini dilakukan oleh Gia Noor Syah Putra, Tri Legionosuko, Adnan Madjid (2019) yang berjudul: "Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Negara-Negara Anggota *Melanesian Spearhead Group (MSG)*. Dalam Menghadapi Propaganda Organisasi Papua Merdeka (OPM): Studi Kasus Negara Republik Vanuatu". Penelitian ini membahas tentang Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurai persoalan dalam strategi kontra propaganda serta bagaimana pemerintah Indonesia memelihara hubungan diplomatik dengan negara-negara anggota MSG. Metode yang digunakan ialah metodologi kualitatif deskriptif analitik, kemudian teori yang digunakan ialah teori strategi dan teori diplomasi publik. Hasil Penelitian menemukan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah konkrit. Ada 3 langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu menguatkan pembinaan teritorial oleh TNI AD di Papua, mengcounter isu-isu yang dipropagandakan oleh OPM melalui dukungan teknologi dan informasi, dan melalui jalur diplomasi.

**Kedua** penelitian ini dilakukan oleh Keoh Kean Peng (2012) yang berjudul: "Konflik Papua Barat dan Implikasinya Terhadap Hubungan Australia-Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar-dasar Australia dalam konflik Papua Barat, dan bagaimana ia memberi implikasi kepada hubungan dengan Indonesia. Konflik Papua barat merupakan isu kritis yang menjadi penghalang hubungan Australia-Indonesia untuk menjadi negara maju dikarenakan papua telah menyentuh kedaulatan indonesia dan dianggap oleh jakarta sebagai isu sensitif yang tidak dapat

di ganggu oleh negara lain termasuk Australia. Meskipun konflik tersebut dapat memburukkan kedua negara, akan tetapi ia tetap menawarkan prospek kerjasama sebagai tujuannya untuk kepentingan bersama.

**Ketiga** penelitian ini dilakukan oleh Hilda Annisa, (2016): yang berjudul “Diplomasi Indonesia Dalam Menyikapi Upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) Untuk Memperoleh Pengakuan Dunia Internasional Periode 2013-2014”, dengan menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri, Teori Diplomasi, dan konsep Separatisme, Penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh OPM untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dan menganalisis upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyikapi upaya OPM untuk mendapatkan pengakuan internasional periode 2013 – 2014. Hasil penelitian ini adalah Indonesia menggunakan diplomasi *multitrack*, namun beberapa jalur *secondtrack* masih belum maksimal dan diaspora OPM diluar negeri semakin menguat.

**Keempat** penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Sabir, (2018): yang berjudul “Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua”, dengan menggunakan teori diplomasi public yang dikemukakan oleh Leonard, Stead, dan Smewing (2002), penelitian ini menjelaskan bahwa diplomasi publik Indonesia untuk memengaruhi sikap politik Vanuatu atas isu separatisme Papua belum berhasil dilakukan, akibat belum optimalnya implementasi diplomasi publik Indonesia. Kegagalan ini ditunjukkan melalui sikap politik Vanuatu yang tetap mendukung gerakan separatis Papua.

**Kelima** penelitian ini dilakukan oleh M. Fathoni Hakim, (2010): yang berjudul “Perjanjian Keamanan Indonesia – Australia: Upaya Indonesia Untuk Mencegah Gerakan Separatis Papua”. Mengapa Indonesia melakukan perjanjian keamanan dengan Australia dalam upaya mencegah gerakan separatisme di Indonesia timur dan apa saja keuntungan yang diperoleh pihak Indonesia dari perjanjian keamanan tersebut dengan menggunakan teori *Formasi Konsep* oleh Patrick Morgan maka Pertama, perjanjian keamanan Indonesia – Australia (Lombok Treaty) merupakan salah satu upaya yang diambil oleh Indonesia terkait dengan kebijakannya untuk mencegah gerakan separatisme, khususnya di Papua. Langkah tersebut dilakukan sebagai kontrol geografi Indonesia yang terbuka, yang rawan akan adanya infiltrasi asing. Kedua, perjanjian keamanan ini juga untuk menghadapi ancaman-ancaman

non-tradisional yang banyak memanfaatkan wilayah Indonesia yang terbuka, khususnya wilayah laut

**Keenam** penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Fadhilah, (2019): yang berjudul "Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri *Melanesia Spearhead Group* (MSG) dalam Isu Papua Barat: Studi Kasus Fiji dan Papua Nugini". Sejak didirikan pada tahun 1988, organisasi yang terdiri dari empat negara Melanesia dan satu organisasi pro kemerdekaan tersebut sangat aktif menyuarakan dekolonisasi di sub-regional Melanesia. Namun, kebijakan luar negeri MSG dalam isu Papua Barat diwarnai oleh inkonsistensi ketika berhubungan dengan perjuangan mendukung dekolonisasi. Secara tidak sengaja menunjukkan perlawanan keras kepada Indonesia yang dituduh melakukan pelanggaran HAM, MSG justru makin mendekat ke Indonesia. Penelitian ini menjelaskan teka-teki yang menggunakan studi kasus Fiji dan Papua Nugini. Penelitian ini menekankan pada faktor-faktor domestik yang mempengaruhi kedua negara dalam isu Papua Barat. Menggunakan konsep kepentingan nasional yang dikombinasikan dengan tekanan domestik sebagai pisau analisis, artikel ini berpendapat bahwa inkonsistensi kebijakan luar negeri dua negara anggota MSG tersebut dipengaruhi oleh faktor domestik.

**Ketujuh**, Penelitian Ini Dilakukan Oleh Felani Angela Rosalia Hématang , Rodon Pedrason, Bambang Wahyudi, (2019): Yang berjudul "Diplomasi Pertahanan Indonesia Di Negara Kawasan Pasifik Selatan Terkait Internasionalisasi Separatisme Papua Guna Menjaga Kedaulatan Indonesia". Perkembangan isu separatisme yang telah diinternasionalisasikan menjadi konsiderasi Indonesia untuk mengembangkan strategi indonesia dalam mempertahankan papua. Teori yang digunakan adalah teori separatisme, *Soft Power*, serta konsep diplomasi pertahanan. Konsep diplomasi pertahanan yang diterapkan indonesia adalah sebagai strategi untuk mempertahankan papua serta menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara kawasan pasifik selatan. Serta membangun kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan yang lebih baik sehingga kepentingan setiap negara dapat terpenuhi dan bentuk-bentuk implementasi kerjasama sebagai bentuk diplomasi pertahanan Indonesia perlu dikembangkan sehingga kedaulatan negara yang menjadi tujuan utama dapat tercapai.

Penelitian terdahulu menggambarkan bahwa isu disintegrasi Papua dan konflik pemerintah Indonesia-Papua belum tuntas. Kedua belah pihak berusaha untuk mengatur kepentingannya di tingkat internasional. Namun yang membedakan penelitian diatas dengan peneliti yaitu lebih menekankan pada menginvestigasi strategi yang dilakukan oleh OPM dalam disintegrasi Papua dari Indonesia dilihat dari konsep *rebel diplomacy*.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian secara umum terbagi menjadi dua kualitatif maupun kuantitatif. Kedua pendekatan ini memiliki ciri masing-masing, baik dari metode penelitian, jenis dan sumber data. Peneliti kali ini lebih cenderung menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Terdapat beberapa macam pendapat menurut beberapa ahli mengenai pengertian dari penelitian kualitatif, **Bogdan** dan **Taylor** dalam **Moleong**, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Mukhtar, 2013: 10).

## **PEMBAHASAN**

### **4.1 Strategi dalam Mengupayakan Kemerdekaan**

Strategi dan Prinsip dasar bagi Papua untuk membangun Papua menjadi lebih bermartabat, beradab dan aspiratif, pada kenyataannya dapat lebih resisten terhadap upaya-upaya separatis, tentu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dan Semua pihak diwajibkan untuk ambil bagian dan memiliki kesungguhan dalam menjalankan komitmen atau jalanya masing-masing, melakukan evaluasi, pengawasan dan melakukan perbaikan-perbaikan. Prinsip dalam upaya tersebut harus mendapat perhatian ekstra dan serius dari semua pihak. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa langkah-langkah strategis yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah sebagai bagian bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat Papua.

Secara umum, langkah-langkah strategis meliputi: (1) pemantapan paradigma perubahan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan dengan segenap turunannya, (2) akselerasi perbaikan kualitas hidup manusia (*human development*),

(3) memberikan akses dan kesempatan berkiperah yang luas bagi masyarakat Papua, baik di tanah Papua maupun di seluruh tanah air, (4) menciptakan keterlibatan sosial (*social engagement*) terhadap seluruh elemen yang ada di Papua, baik sesama kalangan Papua ataupun antara orang Papua dan non-Papua, (5) memantapkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang secara baik kepada aparat pemerintahan (termasuk militer dan kepolisian) maupun masyarakat, (6) keterlibatan lebih banyak masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penting bagi mereka, (7) pengakuan hak-hak adat dan kebebasan pengekspresian hak-hak, (8) perlindungan maksimal terhadap HAM, (9) membentuk semacam utusan khusus (*special envoy*) yang bertanggung jawab sebagai jembatan kepentingan seluruh elemen yang berperan di tanah Papua, (10) memperkuat jaringan dialog dengan berbagai kalangan yang berkepentingan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Papua, baik di dalam maupun luar negeri.

Adapun Selain beberapa langkah-langkah strategis ada beberapa prinsip dasar yang harus terus dikembangkan. **Pertama**, melanjutkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua secara total. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. **Kedua**, melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pembangunan secara berkala. Terutama pemerintah baik pusat maupun daerah harus terus menerus secara objektif dan rasional melakukan monitoring, evaluasi, dan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan selama ini. **Ketiga**, penegakan hukum dan penanganan masalah kekerasan secara adil. Salah satu persoalan mendasar yang berulang kali dijadikan semacam indikasi oleh kaum separatis untuk menandai ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyat Papua dan pada akhirnya dijadikan legitimasi pembenaran bagi wacana maupun aksi-aksi separatisme adalah penegakan hukum yang lemah dan penanganan masalah kekerasan yang tidak tuntas. **Keempat**, pencegahan sistematis atas segala bentuk pelanggaran HAM.

Persoalan lain yang selalu mendapat sorotan baik kalangan dalam maupun luar negeri adalah persoalan pelanggaran HAM. **Kelima**, menguatkan rasa saling percaya. Dengan terbentuknya sebuah nasion yang memiliki semangat kebangsaan (nasionalisme) yang sama dan setingkat menyaratkan adanya apa yang disebut filosof Perancis Ernest Renan sebagai rasa senasib sepenanggungan. Yang dimaksud perasaan yang disebutkan oleh Renan hanya dapat muncul jika ada rasa

percaya yang utuh di antara sesama anak bangsa mengingat adanya rasa senasib sepenanggungan dan berorientasi pada cita-cita luhur yang sama. **Keenam**, melakukan langkah progresif dalam diplomasi. Disadari dengan adanya tantangan baru dalam dunia diplomasi terkait dengan masalah Papua. Tantangan tersebut ditandai dengan munculnya generasi baru kalangan separatis yang didominasi oleh kalangan muda. Kalangan muda ini, berbeda dengan kalangan tua yang lebih memilih jalur pertempuran/kekerasan fisik di hutan belantara, memiliki strategi yang lebih mengedepankan kekuatan jaringan internasional dan peran diplomasi. Perspektif mereka lebih bersifat *go international*, dengan orientasi meluaskan dukungan internasional atas langkah-langkah separatisme di Papua.

## **1.2 Membuka Kantor Konsuler Di Luar Negeri**

### **1.2.1 Membuka Kantor Di Oxford (Inggris)**

Pembukaan kantor di *Oxford* (Inggris) merupakan bukan kali pertama tetapi OPM juga berniat membuka kantor perwakilan di Jerman ungkap salah satu tokoh bernama mahfudz ketua komisi I DPR RI. Kementerian Luar Negeri (kemlu) Indonesia memanggil Dubes Inggris di Jakarta. Mark Canning terkait pembukaan kantor Operasi Papua Barat atau Papua *Free West Campaign* di Oxford, Inggris. Terkait adanya polemik tersebut, Dubes Inggris untuk Indonesia *Mark Canning* menyatakan bahwa peresmian kantor OPM bukan kebijakan resmi pemerintahnya. Pemerintah kota Oxford sendiri tidak bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri dan tidak bisa mengambil keputusan untuk menghadiri pembukaan perwakilan *free west papua* berdasarkan keputusan sendiri. Secara tersirat pesan kedutaan Inggris menyatakan, pemerintah kota *Oxford* tidak mempengaruhi kebijakan luar negeri Inggris. Selanjutnya, kegiatan organisasi tersebut tidak mendapat dukungan dari pemerintah Inggris dan oposisi parlemen di sana. Soalnya pemerintah Inggris secara formal tetap mengakui kedaulatan NKRI atas Papua. Posisi pemerintah Inggris sangat cukup jelas, yaitu menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama

seperti dengan provinsi-provinsi sebelumnya yang ada tepatnya di Indonesia. Pembukaan kantor OPM ini sangat jelas merusak hubungan Inggris dan Indonesia yang terjalin baik

Tokoh utama yang disebut sebagai pendiri atau pembuka kantor konsuler di luar negeri adalah Benny Wenda. Dalam jenjang waktu kurang dari dua tahun kelompok separatis *Free West Papua* pimpinan Benny Wenda telah membuka kantor di beberapa negara, termasuk Belanda dan Australia menyusul pembukaan kantor pertama di kota *Oxford*, Inggris pada April 2013. Dengan dibukanya kantor-kantor di luar negeri yaitu mempunyai misi tertentu pertama kantor dibuka untuk mendidik dunia memberi pengetahuan yang lebih luas, kedua menampung suara rakyat Papua yang perlu di dengarkan aspirasinya untuk kemajuan dalam negeri. (Benny Wenda, 2013). Dalam analoginya, hal ini dijadikan landasan untuk mengatakan bahwa Indonesia adalah “penjajah” di Papua. Dan analogi ini menjadi salah satu amunisi Benny Wenda untuk memaparkan kepada publik mengapa Papua harus berpisah dari Indonesia. Namun pemerintah Indonesia menganggap Kampanye yang dilakukan di luar negeri untuk memisahkan Papua dari Indonesia tidaklah mengandung unsur baru. Sementara apa yang dilakukan pemerintah Indonesia lebih berfokus pada pembangunan di Papua. Retno Marsudi menuturkan hasil pemantauan gerakan kelompok separatis Papua di Belanda ketika dirinya masih menjabat sebagai Dubes RI, aktivis Papua merdeka menampilkan sesuatu yang sudah tidak sah. Dalam penuturannya Retno Marsudi berisi *“pada dasarnya dan kasus yang terjadi dulu sekali, bertahun-tahun yang lalu kemudian diungkap lagi seolah-olah Indonesia tidak pernah maju. Dan itu bukan sesuatu yang sebenarnya terjadi di Papua”*. (Retno Marsudi, 2013).

Oleh karena itu kita juga memberikan informasi-informasi mengenai pembangunan di Papua yang lebih valid dan terkini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pandangan menteri luar negeri didukung oleh mantan aktivis Papua Merdeka, Nicholas Messet. Setelah memperjuangkan pemisahan diri selama 40 tahun dari pengasingannya di Swedia, tokoh masyarakat Papua tersebut memutuskan untuk pulang kembali ke Provinsi Papua. Nicholas Messet menganggap bahwa jika berjuang di negara luar yang bukan negaranya percuma, jika orang Papua dalam negeri pikir bahwa sudah baik tinggal

dengan Indonesia dan tidak ada gunanya berjuang disana. Dan yang sebenarnya terjadi terkait tuntutan pemisahan Papua dari Indonesia yaitu adanya kekerasan yang muncul dan mengakibatkan korban jatuh dari pihak aparat keamanan dan warga sipil.

### **1.2.2 Fungsi dan Peranan Kantor Perwakilan konsuler dalam Hukum Internasional**

Pada awal kantor perwakilan didirikan berfungsi sebagai perwakilan dan penghubung komunikasi antara negara pengirim dengan negara penerima. Akan tetapi hubungan antar bangsa yang semakin besar membuat peranan diplomat dalam hubungan antar bangsa semakin luas.

Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, dalam pasal 3 ayat (1), menyatakan lima fungsi dari perwakilan diplomatik, yaitu:

1. Mewakili negara pengirim di negara penerima
2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, dalam batasan yang diperbolehkan oleh hukum Internasional
3. Melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima
4. Memperoleh segala informasi tentang kondisi dan perkembangan negara penerima dengan segala cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim
5. Mempromosikan kerja sama antara negara pengirim dan negara penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antar mereka.

## **1.3 Melakukan Penyebaran Digital Komunikasi Secara Meluas**

### **1.3.1 Perang Informasi (Netwar) Dan Perjuangan Non-Violent**

Perang informasi (*netwar*) dan perjuangan non-violent sudah terjadi pada pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1998, perubahan tersebut ditunjukkan dalam karakteristik pergerakan Papua. Setelah diserahkannya wilayah Papua kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1962, masyarakat Papua yang tidak menerima penyatuan wilayah dengan NKRI tersebut melakukan perlawanan kepada pemerintah Indonesia sebagai upaya mereka untuk memisahkan diri dengan Indonesia. Jika sebelumnya bentuk perlawanan banyak ditunjukkan dalam perlawanan bersenjata atau *violent struggle/armed*

*struggle* dalam bentuk serangan militer oleh kelompok nasionalis Papua terhadap pasukan keamanan Indonesia yang berada di Papua, setelah masa kepemimpinan Soeharto berakhir, tepatnya pada Mei 1998 perlawanan mulai diwarnai dengan perlawanan tanpa kekerasan atau *non-violent struggle* (Macleod, 2015). Pada awalnya bentuk perlawanan nonviolent yang dilakukan lebih banyak dipenuhi dengan demonstrasi maupun protes di tempat umum dan balai-balai pemerintahan. Kelompok pejuang kemerdekaan menggunakan *banner*, bendera, poster, serta spanduk untuk menyuarakan aspirasinya. Kemudian, setelah adanya teknologi informasi modern seperti internet, perlawanan nonviolent kini juga diwarnai dengan persebaran isu-isu, protes, dan kampanye melalui media *cyber* atau media online. Media online sendiri merupakan salah satu alat yang digunakan dalam nonviolent *struggle* yang cukup banyak dimanfaatkan oleh kelompok sipil sendiri karena mempermudah dalam sistem penyebaran berita-berita terkait dengan Papua sendiri.

Dalam kasus Papua, berbagai macam media online digunakan untuk membantu kelompok pendukung Papua Merdeka untuk melakukan kampanye-kampanye kemerdekaan. Berdasarkan pencarian yang dilakukan terdapat lebih dari 20 situs online yang mendukung gerakan Papua Merdeka. Dalam menganalisa pemanfaatan media online oleh gerakan separatis Papua dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi dua macam bentuk media online yang digunakan. Pertama adalah media online umum berupa website atau situs online resmi dari organisasi-organisasi gerakan Papua Merdeka seperti milik Asosiasi Mahasiswa Papua ([www.ampnews.org](http://www.ampnews.org)), [infopapua.org](http://infopapua.org), [www.freewestpapua.org](http://www.freewestpapua.org), [www.ulmwp.org](http://www.ulmwp.org), [www.tapol.org](http://www.tapol.org), dan [www.ilwp.org](http://www.ilwp.org). Kedua adalah dalam bentuk media sosial seperti blog, facebook dan twitter untuk membantu kampanye mereka. Adapun penggunaan media sosial memungkinkan sebuah pergerakan untuk dapat melakukan komunikasi dua arah secara langsung dengan masyarakat luas yang tersambung melalui jaringan internet, sehingga memungkinkan mereka untuk dapat memperluas jaringan yang dapat mendukung pergerakan tersebut. Beberapa contoh media sosial yang mendukung pergerakan Papua Merdeka adalah komunitas [papua.net](http://papua.net), [www.papuapost.blogspot.com](http://www.papuapost.blogspot.com), [ampmalangraya.blogspot.com](http://ampmalangraya.blogspot.com),

loverpapuablog.blogspot.com, Love Papua (Facebook dan twitter), @FreePapua, dan @FreeWestPapua.

Penggunaan media-media online sebagai salah satu sarana perjuangan Papua maupun kelompok pendukung Papua Merdeka adalah melakukan kampanye dan menyebarkan berita-berita mengenai isu dan pergerakan Papua. Ada perbedaan dari pola pemanfaatan media online oleh gerakan Papua Merdeka dan kelompok pro-Papua. Gerakan Papua Merdeka yang umumnya berbentuk sebuah organisasi seperti *Free West Papua*, *International Lawyer for West Papua* (ILWP) dan *International Parliament for West Papua* (IPWP) menggunakan media online tidak hanya untuk menyebarkan berita atau kampanye untuk mendukung Papua Merdeka tetapi juga menggalang dukungan dari masyarakat global untuk berpartisipasi dalam gerakan mereka. Sebagai contoh, dalam situs resmi IPWP dan *Free West Papua*, terdapat kolom ‘*Take Action*’ yang disediakan bagi para pengguna internet yang ingin terlibat secara langsung memberikan dukungan terhadap pergerakan organisasi tersebut. Masyarakat dapat turut serta dalam penandatanganan petisi online dan pemberian donasi untuk membantu mendanai kampanye mereka yang nantinya akan dilaporkan kepada PBB sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Indonesia. Berbeda dengan kelompok pro-Papua atau pendukung Papua, hanya menggunakan media online sebagai media informasi. Bukan untuk penggalangan dana sebagaimana gerakan Papua Merdeka. Hal ini tampak dari mayoritas media online yang dibuat oleh kelompok Pro-Papua seperti blog, Facebook, atau Twitter umumnya hanya berisikan mengenai berita-berita terkait isu Papua serta bagaimana perkembangan perjuangan Papua di ranah Internasional.

Selain blog gerakan Papua Merdeka dan kelompok pro-Papua, terdapat pula media sosial Facebook dan Twitter yang juga cukup banyak menyebarkan dan mengkampanyekan gerakan Papua Merdeka. Salah satu contoh di Facebook adalah akun yang dibuat oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dimana dalam akun facebook tersebut mereka memberikan link atau tautan berita-berita mengenai hal-hal yang dialami oleh masyarakat Papua dan bagaimana perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua. Terkait akun facebook dengan nama OPM ditemukan dua akun yang memiliki nama yang

sama hanya dengan alamat yang berbeda. Pertama adalah Facebook Organisasi Papua Merdeka ([www.facebook.com/Organisasi-papua-merdeka-690126687716225/](http://www.facebook.com/Organisasi-papua-merdeka-690126687716225/)) yang dibuat oleh organisasi komunitas di Paniai, Papua. Sedangkan akun kedua bernama Organisasi Papua Merdeka OPM ([www.facebook.com/Free.Papua/](http://www.facebook.com/Free.Papua/)) yang merupakan akun resmi OPM. Meski memiliki nama yang sama, akan tetapi konten dari laman facebook tersebut cukup berbeda. Akun pertama hanya berupa kampanye yang mendukung kemerdekaan Papua. Seperti misalnya “Bangkit untuk keselamatan harga diri ideologi bangsa.

Dengan adanya akun Organisasi Papua Merdeka berbeda dengan akun Facebook OPM lebih banyak menyebarkan tautan-tautan dari Papua Merdeka News yang berisi berita terkait gerakan kemerdekaan Papua maupun respon yang diterima serta dukungan-dukungan terhadap Papua sebagai upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat luas mengenai kondisi yang terjadi di Papua. Akun OPM ini pun memiliki pengikut lebih banyak jika dibandingkan dengan akun Organisasi Papua Merdeka. Facebook Organisasi Papua Merdeka hanya memiliki 364 pengikut, sedangkan akun OPM diikuti 2,175 orang dan disukai 2,189 pengguna facebook. OPM memanfaatkan jaringan online Facebook untuk memperoleh perhatian masyarakat secara luas. Keberadaan media online seperti facebook membantu OPM untuk dapat menyebarkan informasi mengenai Papua dan fenomena yang terjadi di wilayah tersebut dengan cepat.

Sebagai salah satu contoh berita yang sempat diunggah , pada bulan Februari 2016 OPM mengumumkan bahwa mereka telah mendirikan kantor United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP pada 15 Februari 2015 di Wamena, Papua (Kompas, 2016). Pemberitaan ini tersebar tidak hanya di media nasional, namun juga di beberapa media online internasional seperti Radio.nz yang berbasis di Selandia Baru. Tersebarnya pemberitaan tersebut menjadi pembuktian bagi gerakan pemisahan diri Papua bahwa mereka telah berhasil mendirikan kantor gerakan kemerdekaan di Indonesia. Akan tetapi pada hari berikutnya, pemerintah Indonesia melalui Ketua Kodam Cendrawasih berusaha untuk memberikan sanggahan terhadap berita tersebut, dengan menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar dan tanpa bukti otentik yang membuktikan kebenaran informasi tersebut. Salah seorang tokoh Papua

mendukung sanggahan tersebut dan menyarakan bahwa hal itu merupakan bentuk propaganda yang dilakukan oleh kelompok separatis untuk memperoleh dukungan internasional serta menunjukkan kelemahan Indonesia (News Liputan 6, 2016). Pernyataan ini kemudian juga tersebar melalui media internasional seperti DW.com sebagai bentuk respon pemerintah Indonesia atas penyebaran informasi gerakan separatis Papua.

Adanya peranan teknologi informasi modern (online) dalam konflik serta perubahan strategi konflik dari strategi militer menjadi strategi politik untuk mempengaruhi opini publik inilah yang menjadi karakter dari perang informasi yang terjadi di Papua. Medan perang yang muncul bukanlah medan militer sebagaimana perang konvensional, melainkan *cyberspace* dimana masing-masing aktor saling serang informasi dan opini dengan tujuan untuk memperoleh perhatian dan dukungan masyarakat internasional. Dengan menggunakan media online isu-isu kemanusiaan disebarkan oleh pejuang Papua Merdeka sebagai strategi kampanye untuk meraih perhatian publik dan melemahkan posisi politik Indonesia. Sebagai contohnya, adalah diangkatnya pemberitaan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam situs online Free West Papua yang merupakan laman resmi gerakan pro-Papua Merdeka, serta situs atau media sosial lainnya, banyak dimunculkan berita-berita terkait penindasan yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga Papua (Free West Papua, 2016).

Dengan terciptanya medan perang baru "*non-violent*" dalam konflik Papua, tentu saja telah merubah definisi kalah atau menang dalam pertarungan tersebut. Kalah atau menang bukan dilihat dari berapa besar kerusakan yang ditimbulkan ataupun seberapa banyak pasukan yang gugur, melainkan siapa yang berhasil memenangkan hati dan pikiran masyarakat (Pratkanis, 2007). Tujuan inilah yang menjadi inti dari kampanye gerakan pemisahan diri Papua. Berbagai bentuk kampanye, pembentukan petisi, dan diplomasi di ranah internasional dilakukan untuk memperoleh hati masyarakat global sehingga mampu mempengaruhi dan menekan Pemerintah Indonesia untuk melepaskan Papua sebagai negara merdeka yang mana bagi kelompok pejuang Papua merupakan hak mereka sebagai bangsa Papua. Penggunaan media online

sebagai alat kampanye kemerdekaan Papua nampaknya cukup membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat dari diangkatnya isu Papua dalam sidang umum PBB pada tahun 2016 lalu. Meski demikian, di Indonesia sendiri, nampaknya isu ini tidak diberitakan sebanyak pemberitaan media internasional.

#### **1.4 Memberikan Informasi Tidak Resmi ke Negara Luar dalam Mendapatkan Dukungan Internasional**

##### **1.4.1 Melobi dan Berdiplomasi dengan Negara Luar**

Upaya yang dilakukan untuk meraih dukungan secara internasional yang dilakukan oleh kelompok pemberontak adalah salah satunya dengan melakukan lobi dan diplomasi dengan negara luar. Semua itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan dukungan terhadap pihak luar supaya dukungan tersebut mendapat perhatian secara internasional dan tidak secara domestik saja hal ini dilakukan juga guna supaya dapat mempengaruhi pihak luar terhadap ingin mendapatkan pengakuan dunia secara internasional. Kemudian kelompok pemberontak bertemu secara langsung dengan kepala negara asing dan menjadi berita utama, dimana para pemimpin pemberontak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk memperluas jaringan simpatisan dan memberikan pengakuan kepada kelompok mereka untuk mendapatkan dukungan secara Internasional. Selain kelompok pemberontak ataupun organisasi antarpemerintah ada juga organisasi yang melakukan dukungan internasional yaitu Aktor nonnegara yang berperan sangat dominan dalam peta politik global saat ini adalah perusahaan global yang dikenal dengan *Multinational Corporations (MNC)*, *Transnational Corporations* atau *Global Firms*. Dengan kata lain, perkembangan politik di tingkat nasional maupun regional/ internasional harus memperhitungkan peran dan kepentingan perusahaan-perusahaan berskala dunia ini.

Dengan bertambahnya jumlah aktor nonnegara yang terlibat dalam hubungan antarnegara dan antarbangsa menyebabkan peran aktor negara tidak lagi bersifat dominan. Perkembangan politik internasional ini merupakan salah satu faktor dalam analisis persoalan Papua. Berdasarkan pola hubungan tersebut, sangat sulit sekali memisahkan secara tegas apakah seorang aktor lokal hanya berperan secara lokal, karena dalam mempertahankan

kepentingannya dia pun bergerak di tingkat nasional bahkan internasional. Selain kepentingan yang saling berkait, peran para aktor ditentukan pula oleh pola hubungan atau hubungan kekuasaan (*power relations*) antara ketiganya yang cenderung bersifat tidak simetris (*asymmetrical*), misalnya posisi masyarakat Papua di tingkat lokal dan nasional tampak atau cenderung lemah (*powerless*) dibandingkan dengan kekuasaan pemerintah (pusat dan daerah).

Namun demikian, di level internasional, elemen-elemen yang ada dalam masyarakat Papua, contoh seperti kelompok pro-merdeka di Papua banyak mendapatkan dukungan/sympati dari pihak internasional. Mereka berhasil mengusung ideologi merdeka dalam rangka mendapatkan simpati dan dukungan internasional. Dengan kata lain, meskipun secara lokal dan nasional, masyarakat Papua cenderung menjadi kelompok marginal, di tingkat internasional dan justru ini menguntungkan bagi mereka. Bahkan, mereka memiliki posisi tawar yang cukup tinggi bila berhadapan dengan Pemerintah Indonesia karena simpati dan dukungan pihak internasional pada gerakan/kelompok pro- merdeka di Papua. Selain dilakukannya posisi tawar yang tinggi oleh kelompok pro-merdeka Papua, Papua juga melakukan lobi dan diplomasi. Kelompok pro-merdeka ini bertujuan untuk memperoleh dukungan internasional, baik yang berasal dari pemerintahan negara asing maupun masyarakat internasional, termasuk organisasi nonpemerintahan di tingkat internasional dan lembaga dunia (global).

Bentuk diplomasi yang dilakukan terhadap negara luar salah satunya yaitu Diplomasi Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme di Papua. Gerakan separatistis di Papua menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian khusus pemerintah Indonesia. Gerakan ini menghendaki pemisahan wilayah Papua yang saat ini terbagi menjadi dua provinsi—Papua dan Papua Barat. Penyebab berkembangnya gerakan ini adalah kekecewaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat dalam menangani berbagai permasalahan di Papua. Permasalahan-permasalahan tersebut teridentifikasi dalam laporan hasil kunjungan Komisi I DPR RI dengan berbagai pemangku kepentingan pada tahun 2012 di Papua, antara lain: 1) menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat dan daerah; 2) menguatnya isu politik dan historis tentang proses

integrasi Papua; 3) tidak efektifnya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dalam akselerasi pembangunan; 4) lumpuhnya pemerintah provinsi akibat kisruh pilkada dan lemahnya kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota; terakhir 5) meluasnya aksi kekerasan bersenjata di Papua (Papua Review, 2012, hal. 8).

Kelompok separatis ini menamakan wilayah Papua sebagai West Papua atau Papua Barat. Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua ditunjukkan dengan pembentukan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang menyatukan faksi-faksi perjuangan OPM antara kelompok bersenjata dan faksi politik. Dengan adanya ULMWP dimaksudkan agar upaya kemerdekaan Papua lebih terkoordinasi untuk meraih dukungan politik dari masyarakat internasional (ULMWP 2017). ULMWP didirikan pada 7 Desember 2014 di Port Vila, Republik Vanuatu, ULMWP sendiri memiliki tugas pokok untuk mengkampanyekan Papua merdeka (*free West Papua campaign*) serta melakukan lobi-lobi politik untuk mendapatkan dukungan dari berbagai negara, terutama di kawasan Pasifik Selatan.

Dengan adanya dukungan internasional kepada kelompok pro-merdeka di Papua ini menimbulkan kompleksitas yang cukup serius bagi Pemerintah Indonesia dalam berdiplomasi dengan pihak luar negeri. Meskipun Pemerintah Indonesia memiliki legitimasi politik yang kuat yaitu (kedaulatan yang sah) di Papua, posisi tawar Indonesia menjadi lemah ketika berhadapan dengan komunitas internasional berkaitan dengan persoalan demokratisasi, hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan di Papua. Hal ini dikarenakan isu- isu tersebut merupakan agenda global yang kerap dipakai untuk mengukur ataupun menilai tingkat keberhasilan ataupun kegagalan sebuah pemerintahan di negara-negara berkembang. Bagi kelompok pro- merdeka, khususnya OPM, agenda global tersebut menjadi isu-isu strategis yang sangat menguntungkan bagi posisi atau “perjuangan” mereka di forum internasional.

Dukungan internasional dilakukan guna untuk mencapai/mewujudkan kepentingan politik dalam jangka panjang oleh kelompok pro-merdeka, lebih tepatnya memisahkan diri dari Indonesia. Diplomasi dan tuntutan politik merdeka inilah yang diberi label oleh Pemerintah Indonesia sebagai gerakan separatis Papua (separatisme Papua). Bagi Pemerintah Indonesia, kedaulatan

Indonesia di Papua sudah menjadi keputusan final. Untuk menghadapi sikap dan tindakan kelompok pro-merdeka, Pemerintah Indonesia pun melakukan lobi dan diplomasi guna memperoleh dan mempertahankan komitmen internasional untuk tetap mendukung keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di mana Papua merupakan bagian keseluruhan dari NKRI.

Keinginan untuk menginternasionalisasi Papua adalah salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Kongres Rakyat Papua II, yakni pembentukan sebuah tim untuk melobi masyarakat internasional, termasuk meminta bantuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam kaitannya dengan peran DK PBB sebagai penjaga ketertiban dan perdamaian dunia, termasuk untuk menjaga/ memelihara keamanan di Papua sampai terbentuk pemerintahan yang tetap. Selain itu, kongres juga meminta PDP melakukan dialog dengan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat (AS), dan PBB. Lobi internasional juga dilakukan oleh kelompok pendukung Papua merdeka secara bilateral, antarnegara maupun di forum regional/internasional dan dengan LSM. Lobi bilateral dijalankan melalui pendekatan persuasif kepada pemegang simpul pemerintahan di berbagai negara.

Upaya bilateral juga dilakukan dengan membuka kantor perwakilan dan konsulat. Hasilnya adalah beberapa negara di Pasifik Selatan secara tegas mendukung perjuangan kelompok pro-merdeka di Papua. Namun, harus diingat bahwa dukungan dari pemerintahan negara asing terhadap kelompok pro-merdeka di Papua tidak bersifat konstan, tetapi cenderung fluktuatif bergantung pada siapa pemimpin negara yang sedang berkuasa pada saat itu.

#### **1.4.2 Internasionalisasi Isu HAM (Menyuarakan Aspirasi Secara Internasional)**

Internasionalisasi isu HAM ditandai dengan runtuhnya rezim Soeharto dan dimulainya era reformasi menjadikan aspirasi masyarakat dapat disampaikan seluas-luasnya, dapat mengekspresikan keinginan dalam bentuk demonstrasi maupun dialog. Momentum ini juga memberi ruang bagi masyarakat khususnya tokoh-tokoh OPM untuk terlibat secara aktif dalam upaya perjuangan kemerdekaan Papua (Rusdiarti dan Pamungkas 2017). Dilakukannya Musyawarah Besar (Mubes) dan Kongres Papua tahun 2000

membentuk lembaga baru yakni Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah bentuk akomodasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua. Selain itu, lembaga yang terbentuk adalah PDP. Berdasarkan penelitian LIPI, Presidium Dewan Papua (PDP) lahir pada era transisi demokrasi yang mana ruang gerak mulai lebih terbuka daripada pada era OPM (Rusdianti dan Pamungkas 2017). Hal ini juga mengakibatkan adanya dua pandangan yang menyatakan bahwa OPM dengan PDP memiliki tujuan yang sama namun jalan yang berbeda. OPM bertindak dengan cara kekerasan sedangkan PDP melalui cara-cara dialog politik. Lebih lanjut, transisi masyarakat Papua ke arah yang lebih demokratis terlihat saat pemberian otonomi khusus oleh Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua.

Perubahan era reformasi ini juga menjadikan tokoh OPM dalam negeri lebih mudah melakukan interaksi/berdiskusi terhadap tokoh OPM luar negeri. Di samping dalam negeri mulai menjamur, LSM yang mendukung kemerdekaan Papua dari cara menunjukkan pelanggaran HAM di Papua, organisasi yang digagas oleh OPM di luar negeri juga cukup memiliki peran yang signifikan. Muncul beragam organisasi politik yang mengatasmakan perjuangan kemerdekaan Papua serta memiliki hubungan dengan OPM dalam negeri. Pertama, *The Free West Papua Campaign* yang didirikan oleh Benny Wenda pada tahun 2000 di Inggris. Benny Wenda merupakan tokoh yang terduga dalam kasus penyerangan kantor polisi di Abepura dan melarikan diri ke Papua Nugini hingga akhirnya mendapatkan suaka politik di Inggris. Kedua, *West Papua National Authority* (WPNA) yang berdiri tahun 2004 dengan tujuan sebagai tempat dari titik politik OPM. Organisasi ini dibentuk oleh Edison Waromi, Herman Wanggai, dan Jacob Rumbiak. Ketiga, *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL) yang berdiri tahun 2005 oleh OPM Pemka, Otto Ondawame. Dalam organisasi ini, Mathias Wenda menjadi pimpinan tertinggi. Tujuan dari organisasi ini adalah sebagai sayap politik dari OPM namun ditolak gagasannya oleh OPM dalam negeri yakni Goliath Tabuni dan Kelly Kwalik. Keempat, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dibentuk tahun 2008 dengan ketua Buchtar Tabuni. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah aspirasi politik masyarakat Papua dan membangun hubungan dengan OPM bersenjata pada era Victor Yeimo tahun 2012 (Detik News 2018).

Sedangkan versi LIPI menyebutkan bahwa disamping keberadaan WPNCL, terdapat dua organisasi baru yang muncul setelah diadakannya Konferensi Perdamaian Papua tahun 2011 yakni Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dibentuk tahun 2011 pada Kongres Rakyat Papua III dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) tahun 2012 (Rusdianti dan Pamungkas 2017). Kedua organisasi tersebut selain PNWP berusaha untuk dapat diterima keanggotaannya dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

Sehingga organisasi-organisasi ini berkembang secara masif untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Salah satu wujud yang akhirnya dilakukan adalah bersatu dalam satu wadah yakni *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) tahun 2014. Organisasi ini dibentuk untuk menyampaikan suara aspirasi keinginan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri, yang mana cara yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan *Melanesian Ways* yang dipegang teguh oleh *Melanesia Spearhead Group* (MSG) bahwa seluruh bangsa Melanesia harus merdeka dari penjajahan (Tirto 2019). Dengan demikian, HAM akhirnya digunakan sebagai senjata oleh ULMWP yang mana presiden ULMWP, yakni Otovianus Mote menyampaikan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dalam Kongres Amerika Serikat. Ia menyebutkan bahwa aparat militer Indonesia mengintimidasi orang Papua dengan penyebutan yang kurang manusiawi, seperti bajingan, anjing, kotoran Wonda dan Dipes Tabuni, serta bentuk penyiksaan lain diantaranya diancam dengan pisau dan dibakar alat kelaminnya ketika menanyakan tentang informasi keberadaan OPM.

Dengan demikian bahwa peralihan strategi yang dilakukan oleh OPM hingga terbentuk menjadi ULMWP dikarenakan adanya perbedaan pendapat secara internal. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri dengan munculnya berbagai faktor seperti perubahan kepemimpinan, lamanya waktu perjuangan, terdesaknya ruang gerak, hingga momentum besar yakni era reformasi yang ditandai dengan bebasnya akses informasi dan menyampaikan aspirasi secara luas guna untuk mendapatkan dukungan secara internasional.

## **1.5 Membuat Jaringan Di Negara Luar**

Salah seorang tokoh yang melakukan penyebaran berita hoax dalam jaringan teknologi komunikasi/website adalah Benny Wenda dan Veronika Koman. Benny Wenda adalah seorang tokoh pembebasan Papua Barat yang saat ini berada di Oxford, Inggris. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia menuding Benny sebagai sosok di balik serangan yang dilakukan terhadap pos-pos TNI/Polri pada tahun 2002. Sementara Veronika Koman merupakan kuasa hukum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang sekarang menjadi tersangka karena menurut polisi, yang bersangkutan telah menyebarkan berita hoaks dan memprovokasi kelompok tertentu. Mereka melakukan penyebaran berita hoax ke luar negeri dengan harapan ada beberapa negara maupun NGO asing yang bersimpati terhadap aksi unjuk rasa anarkis, dan seolah olah Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Papua. Selain itu untuk memperoleh dukungan secara internasional, dalam penelitian ini terdapat dimana adanya kelompok pemberontak yang telah melakukan membuat jaringan di negara luar sebagai tujuannya untuk lebih banyak lagi memperoleh suara mereka secara global. Kelompok pemberontak disini mereka dapat membentuk kementerian luar negeri sesuka hati, membuka kantor konsuler dan melakukan kunjungan tingkat tinggi ke ibu kota asing namun mengharuskan negara tuan rumah di luar negeri terlebih dahulu mengulurkan tangan mereka kepada kelompok pemberontak.

Mengapa kelompok pemberontak melakukan atau membuat jaringan secara internasional? Karena kelompok pemberontak disini lebih yakin terhadap jaringan internasional yang dilakukannya karena mempunyai hasil yg baik dan *feedback* dari negara luar. *Feedback* yang di peroleh dari kelompok pemberontak sendiri mungkin tanggapan yang berupa dukungan terhadap kelompok pro-merdeka Papua. Dengan kata lain kelompok pemberontak lebih mengutamakan jaringan luar negeri karena dengan mudah kelompok pemberontak bisa saja menyebarkan berita-berita yang berbaur hoaks (tidak benar) yang sebenarnya tidak terjadi di Papua sendiri dan ini merupakan sebagai alasannya untuk lebih mementingkan negara luar dalam upaya memperoleh dukungan ketimbang terhadap masyarakat yang ada di dalam negerinya sendiri.

Beberapa organisasi non-pemerintah yang berkepentingan dan ikut andil di dalam membuat jaringan di negara luar untuk mendapatkan dukungan secara internasional yaitu mengadakan/ membuat Kantor Informasi Internasional OPM di

Papua. Keberadaan lembaga Kantor Informasi Internasional OPM ini tidak diketahui secara pasti. Namun dalam konferensi pers pada 1 Februari 2000, J. H. Prai, Direktur Kantor Informasi Internasional OPM di Swedia menyerukan penghentian pelanggaran dan kejahatan HAM yang dilakukan oleh TNI kepada penduduk Papua. Pernyataan tersebut berjudul “ *West Papuan 's Desire Autonomy and End to Indonesian Military Operations*”. Dimana sebuah keinginan bagi orang Papua Barat mengadakan otonomi sendiri dan mengakhiri operasi militer di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Melalui uraian pembahasan dan bab-bab sebelumnya maka peneliti membuat kesimpulan bahwa setelah banyaknya konflik-konflik yang terjadi oleh OPM dan di pengaruhi oleh aktor non-Negara yaitu upaya OPM memisahkan Papua dari NKRI adanya penyebaran informasi yang tidak benar semata-mata hanya mencari perhatian dunia dalam mendapatkan suara atau status secara internasional serta adanya isu yang menjadi pokok utama dalam pembahasan masalah peneliti.

Kemudian konflik yang terus berlanjut hingga sekarang dengan menyebarnya isu atau informasi yang secara luas dilakukan oleh Benny Wenda yang disebut sebagai tokoh pembebasan Papua Barat. Kemudian dengan berbagai alat teknologi yang canggih dan modern faktor ini juga yang mengakibatkan isu terus saja berlanjut tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya hanya meyakini isu yang tersebar melalui media online dimana isu ini dilakukan sebagai upaya dalam penggalangan suara untuk menyikapi perhatian publik dalam strategi OPM megupayakan disintegrasi papua dari NKRI.

Dengan demikian adanya gerakan separatis yang menginginkan Papua terlepas dari NKRI ternyata tidak bisa dilakukan begitu saja. Adanya banyak faktor yang melandasi karena hal tersebut tidak berhasil dilakukan begitu saja walau bagaimanapun bagi Indonesia sendiri Papua Barat merupakan wilayah yang jauh lebih berharga belum lagi hubungan bilateral yang terjalin sangat menguntungkan bagi Indonesia sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Coggins, Bridget L. 2017. “*Rebel Diplomacy: Theorizing Violent Non-State Actors’ Strategic Use of Talk.*”: 98–118.
- Elisabeth, Adriana. 2006. “Dimensi Internasional Kasus Papua.” *Peneliti Bidang Politik Internasional, P2P LIPI & Koordinator Tim Kajian Papua*: 43–65.
- Fadhilah Muhammad. 2019. “Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri *Melanesia Spearhead Group* ( MSG ) Dalam Isu Papua Barat: Studi Kasus Fiji Dan Papua Nugini.” *Indonesian Perspective* 4(1): 59–81.
- Hadi R.P. Strategi Perang Informasi (Netwar) dan Perjuangan Non-violent dalam Upaya Pemisahan Diri Papua di Indonesia. *J Transform Global*. 2016;4(1):17.
- Hakim, M.Fathoni. 2010. “*Perjanjian Keamanan Indonesia – Australia 2006 Dengan Upaya Indonesia Dalam Mencegah Gerakan Separatisme Di Indonesia Timur.*” : 1–23.
- Hematang, Bambang Wahyudi, Rodon Pedrason. 2019. “Diplomasi Pertahanan Indonesia Di Negara Kawasan Pasifik Selatan Terkait Internasionalisasi Separatisme Papua Guna Menjaga Kedaulatan Indonesia.” *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 5(2): 87–106.
- Huang, Reyko. 2016. “*Rebel Diplomacy in Civil War.*” *International Security* 40(4): 89–126.
- Hulu, Andriana. 2014. “Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Pada Karangan Narasi.” : 27–34.
- Ikbal,S.H., M.H. 2013. “*Kedudukan Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.*” : 201–10.

Irna Farina Imran. *Peranan Indonesia Dalam Menangani Masalah Lalu*. Published online 2014.

Mambraku N.ST. *Penyelesaian Konflik Di Tanah Papua Dalam Perspektif Politik Papua Conflict Resolution From Political Perspective*. 2015;(21):75-86.

Malo Yuling. *Organisasi Papua Merdeka Tahun 1960-1969*. Published online 2017.

Michele Bos, Jan Melissen. 2019. "*Rebel Diplomacy and Digital Communication : Public Diplomacy in the Sahel*." *Internasional Affairs* 95 6(12): 1331–48.

Noor, Firman. 2016. "Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua." *Jurnal Pertahanan* 6(3): 19–46.

Paramita Ni Putu Triska. *Peralihan Model Pergerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dengan Pemanfaatan Strategi Non-Kekerasan Pasca Tahun 2000*. *Int. Relation*. Published online 2000:2.

Racharjo, Putri Mentari. 2019. "Diplomasi Publik Baru Dalam Penyajian Informasi Dan Gambaran Budaya Jepang Oleh Saluran Youtube ' Only in Japan'". *Padjadjaran Journal of International Relations* 1(1): 3–21.

Sabir, Ahmad. 2018. "Grafik Ketahanan Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Aktor-Aktor Non-Negara." *Jurnal Hubungan Internasional* 11(1): 91–108.

Saeri. Muhammad, 2012. "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik." *jurnal Transnasional* 3(2): 1–19.

Sandi Wahyudi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009. *Fungsi Kantor Perwakilan Menurut Hukum Internasional*. *skripsi*. Published online 2009:10-51.

Tippe Syarifudin. *Implementasi Kebijakan Bela Negara Di Perbatasan : Studi Kasus*

Di Provinsi Papua. *J sosioteknologi*. 2013;(12):416.

**situs:**

Wenda Benny. Tokoh Benny Wenda. Kompas.com

<https://www.pelajaran.co.id/2017/02/pengertian-strategi-menurut-pendapat-para-ahliterlengkap.html#:~:text>

<https://www.google.com/search.Internasionalisasi+menurut+Johanson+dan+Vahlne&oq=Internasionalisasi+menurut+Johanson+dan+Vahlne>

<https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-asasi-manusia-ham/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/30/210000269/kedaulatanpengertian-jenis-dan-sifat?page=all#:~:text=Menurut%20Jean%20Bodin>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Papua\\_Merdeka](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka)





